

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri, sehingga setiap daerah bisa mandiri dalam mengelola dan menghidupi perekonomiannya atau yang biasa disebut otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah dapat mengembangkan daerah yang dipimpinnya sesuai dengan kepentingan prioritas dan potensi daerah tersebut. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, untuk dapat membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi yang besar seiring dengan meningkatkan perekonomian masyarakat dan kemajuan teknologi. Dengan begitu pajak kendaraan bermotor dapat terus ditingkatkan penerimaannya dengan berbagai cara atau upaya. Pada bulan oktober 2020 pemerintah NTT melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 57 Tahun 2020 yang berisi tentang pembebasan denda keterlambatan atas pelunasan pajak kendaraan bermotor, pembebasan dari bea balik nama kendaraan bermotor plat luar daerah, dan pembebasan dari keterlambatan atas pelunasan asuransi kecelakaan SWDKLLJ.

Kebijakan tersebut dibuat selain untuk membantu masyarakat dalam masa pandemi covid-19 juga dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, dimana (dalam Pos Kupang Heronimus) menyampaikan bahwa “kendala selama pandemi covid-19 sejak Januari hingga Oktober 2020 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor masih sekitar 50an persen lebih”. Pemerintah NTT berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut, sehingga ditahun-tahun berikutnya dapat melakukan pembayaran pajak dengan normal dan kemudian akan memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah NTT.

Samsat Kabupaten Manggarai merupakan salah satu tempat wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor yang berada di Provinsi NTT. Kabupaten Manggarai dipilih sebagai subjek penelitian ini karena Kabupaten Manggarai merupakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk tertinggi kelima di Provinsi NTT dan termasuk 10 besar kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi NTT, selain itu juga karena Kabupaten Manggarai merupakan kabupaten dengan jumlah pembelian kendaraan bermotor terbanyak pertama di tahun 2013 dan 2014, dan jumlah pembelian kendaraan bermotor terbanyak ke dua setelah Kota Kupang pada tahun 2015, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data banyaknya BPKB yang dikeluarkan Kepolisian Daerah NTT pada tahun 2013-2015 yang merupakan data terakhir yang dipublikasikan di website Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.

Oleh karena itu Samsat Kabupaten Manggarai bisa mewakili kabupaten lain di Provinsi NTT dalam mengevaluasi penerapan peraturan gubernur yang telah diterapkan. Penerimaan pajak yang diterima oleh Samsat Kabupaten Manggarai lambat laun akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan

bermotor yang berada di Kabupaten Manggarai dan diharapkan para wajib pajak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor untuk menunjang penerimaan pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Pada Peraturan Gubernur NTT Nomor 57 Tahun 2020 terdapat kebijakan salah satunya adalah pembebasan denda keterlambatan atas pelunasan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini akan mengakibatkan pajak kendaraan bermotor yang akan dibayar oleh wajib pajak lebih ringan, karena hanya akan membayar pajak yang seharusnya terhutang tanpa ada denda administrasi akibat keterlambatan atas pelunasan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan yang dikeluarkan ditahun 2020, karena ditahun-tahun sebelumnya keringanan yang diberikan hanya untuk objek pajak kendaraan bermotor yang menunggak maksimal 2 tahun, namun ditahun 2020 keringanan diberikan untuk semua tunggakan tanpa melihat berapa lama tahun tunggakannya. Dengan adanya keringanan tersebut maka kemungkinan banyak wajib pajak yang memiliki tunggakan PKB akan terdorong untuk membayar pajaknya agar terhindar dari denda administrasi tersebut.

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian dari Ekasari dan Akbari (2017) yang menyatakan bahwa Tingkat Efektifitas Penerimaan PKB Tahun 2016 pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota Sudah Efektif. Penelitian dari Wondal, dkk. (2018) yang menyatakan bahwa Program Keringanan Berpengaruh Positif terhadap Peningkatan Penerimaan PKB di UPTD Samsat Manado Walaupun Implikasinya Tidak Terlalu Besar. Dan penelitian dari Astanto (2006) yang menyatakan bahwa Ada Perbedaan yang

Signifikan terhadap Efektifitas Penerimaan PKB dan BBNKB Sebelum dan Sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004, Dengan kata lain dengan berlakunya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 mengakibatkan naiknya efektifitas penerimaan PKB dan BBNKB di Pemerintah Kabupaten Bantul.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur NTT Nomor 57 Tahun 2020, maka Wajib Pajak diharapkan dapat memanfaatkan program keringanan yang diberikan pemerintah dengan melakukan pembayaran PKB yang dimiliki, khususnya bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PKB dari tahun-tahun sebelumnya, agar pada tahun berikutnya dapat melakukan pembayaran PKB dengan normal dan dapat memberikan kontribusi berarti bagi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan diajukan adalah “Apakah Penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 57 Tahun 2020 Sudah Efektif atau Belum dalam Meningkatkan Penerimaan PKB di Samsat Kabupaten Manggarai? “.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 57 Tahun 2020 terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Manggarai. Peraturan tersebut sudah berjalan efektif atau belum akan dianalisis dengan melihat perbandingan efektivitas penerimaan PKB sebelum dan saat diterapkannya

peraturan gubernur tersebut, serta melihat seberapa besar peran sosialisasi yang telah dilakukan dalam menyukseskan penerapan peraturan gubernur tersebut.

#### 1.4. **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini dapat dijadikan literature perpajakan, yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian berikutnya, yang membahas tentang peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, serta dapat membantu Pemerintah Daerah NTT dalam mempertimbangkan keputusannya dalam memberikan keringanan terkait upaya meningkatkan penerimaan pajak di Provinsi NTT.

#### 1.5. **Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan disusun sebagai gambaran dari skripsi berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN. Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah dan fenomena yang terjadi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II LANDASAN TEORITIS. Dalam bab ini akan dijelaskan terkait teori-teori yang mendukung penelitian ini yang meliputi pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, pengelompokan pajak, pengertian pajak daerah, pengertian pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan PKB dan tarif PKB, Peraturan Gubernur NTT Nomor 57 Tahun 2020, dan penelitian terdahulu.

Bab III METODE PENELITIAN. Bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, subjek penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan rencana pembahasan hasil.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini akan memuat pembahasan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk dijadikan evaluasi dalam memberikan dan menjalankan program keringanan perpajakan.

